

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik periode Tahun 2025-2029 melalui 8 (delapan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PAPBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2021-2026

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender;
2. Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter;
3. Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian sasaran strategis tahun 2021-2026, realisasi 8 (delapan) indikator tersebut dapat dilihat pada table 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun
Sebelumnya untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KETERA-NGAN
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	4,21%	2,25%	6,74%	9,55%	10,39%	Meningkat
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi	10,42%	12,75%	19,64%	30,43%	95,65%	Meningkat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KETERA-NGAN
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	
		dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)						
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	2,03 (Th. 2020)	1,89 (Th. 2021)	1,89 Kelahiran (Th.2021)	1,94 Kelahiran (Th. 2023)	1,92 Kelahiran	Meningkat
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76,53 (Th. 2020)	78,42% (Th.2021)	78,42% (Th.2021)	67,78%	65%	Menurun
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	15,04 (Th. 2020)	13,65% (Th. 2021)	13,65% (Th. 2021)	9,27%	9,27% (Th. 2024)	Meningkat
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Meningkat

Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 2 (dua) indikator dengan realisasi yang tetap dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode renstra tahun 2021-2025. Penjelasan 8 (delapan) indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Indikator yang pertama yaitu Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan. Upaya membangun kemandirian desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional tentu

tidak dapat dipisah dari partisipasi masyarakat. Menurut UU Desa, forum dan ruang bagi partisipasi telah dibuka lebar dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan musyawarah desa. Melalui Musrenbangdes, perempuan dapat ikut serta mengajukan usulan pembangunan desa, dan menjadi masukan bagi unit pemerintah di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).

Merujuk pada penjelasan tersebut, diperoleh hasil perhitungan persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan tahun 2025 sebesar 10,39% yaitu sebanyak 37 desa dari 356 desa yang ada di kabupaten gresik telah mengakomodasi usulan perempuan, dengan target awal yaitu sebesar 10% desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada table 3.3 berikut.

Tabel 3.5

Jumlah Desa yang telah Mengakomodasi Usulan Perempuan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TAHUN 2025
1.	Dukun	26	0
2.	Balongpanggang	25	1
3.	Panceng	14	14
4.	Benjeng	23	0
5.	Duduksampeyan	23	0
6.	Wringinanom	16	1
7.	Ujungpangkah	13	0
8.	Kedamean	15	0
9.	Sidayu	21	12
10.	Manyar	23	3
11.	Cerme	25	2
12.	Bungah	22	2
13.	Menganti	22	0
14.	Kebomas	21	0
15.	Driyorejo	16	0
16.	Gresik	21	1
17.	Sangkapura	17	1
18.	Tambak	13	0
	Jumlah	356	37

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kecamatan yang sudah mengakomodasi usulan perempuan melalui musrenbang tahun

2025 yaitu Kecamatan Balongpanggang sebanyak 1 desa, Kecamatan Panceng sebanyak 14 desa, Kecamatan Wringinanom sebanyak 1 desa, Kecamatan Sidayu sebanyak 12 desa, Kecamatan Manyar sebanyak 3 desa, Kecamatan Cerme sebanyak 2 desa, Kecamatan Bungah sebanyak 2 desa, Kecamatan Gresik sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sangkapura sebanyak 1 desa.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG). Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 dari 46 OPD di Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada minimal 30% kegiatannya. Peningkatan yang signifikan ini didukung salah satunya oleh dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten gresik yang sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI.
3. Indikator yang ketiga yaitu Total Fertility Rate (TFR). Nilai Total Fertility Rate (TFR) adalah nilai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur yang digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator TFR Tahun 2025 yaitu

Aplikasi Siperindu. Nilai TFR tahun 2025 yaitu sebesar 1,92. Nilai TFR sebesar 1,92 kelahiran berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia suburnya.

4. Indikator yang keempat yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR). Nilai Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator CPR yaitu Aplikasi SIGA BKKBN. Nilai CPR tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 65% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan karena masih ada nilai yang dianut masyarakat yang menghambat kepesertaan KB. Berdasarkan target tahun 2025 sebesar 70-76% sehingga didapatkan nilai capaian Indikator CPR sebesar 89,04%. Meskipun nilai CPR mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun nilai capaian Indikator CPR tergolong dalam rentang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.
5. Indikator yang kelima yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Usia Kawin Pertama (UKP) yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan, sehingga nilai UKP dibawah 20 tahun semakin kecil maka semakin baik. Nilai UKP digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun 2024 dikarenakan perhitungan data UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat.

Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27%.

6. Indikator yang keenam yaitu Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Dari 100% target cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) tahun 2025, sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 316 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 295 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya prosesnya masih berlanjut di tahun 2026. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Secara rinci data kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif Tahun 2025 di Kabupaten Gresik

No	Bulan	Tahun 2025
1	Januari	15
2	Februari	30
3	Maret	9
4	April	24
5	Mei	14
6	Juni	38
7	Juli	33
8	Agustus	28
9	September	25
10	Oktober	42
11	Nopember	29
12	Desember	29
	Jumlah	316

7. Indikator yang ketujuh yaitu Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif. Hasil persentase kasus anak dalam situasi khusus yang mendapat layanan komprehensif ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026 dari target sebesar 100%. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Tabel 3.7

**Data Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani
Tahun 2025 Kabupaten Gresik**

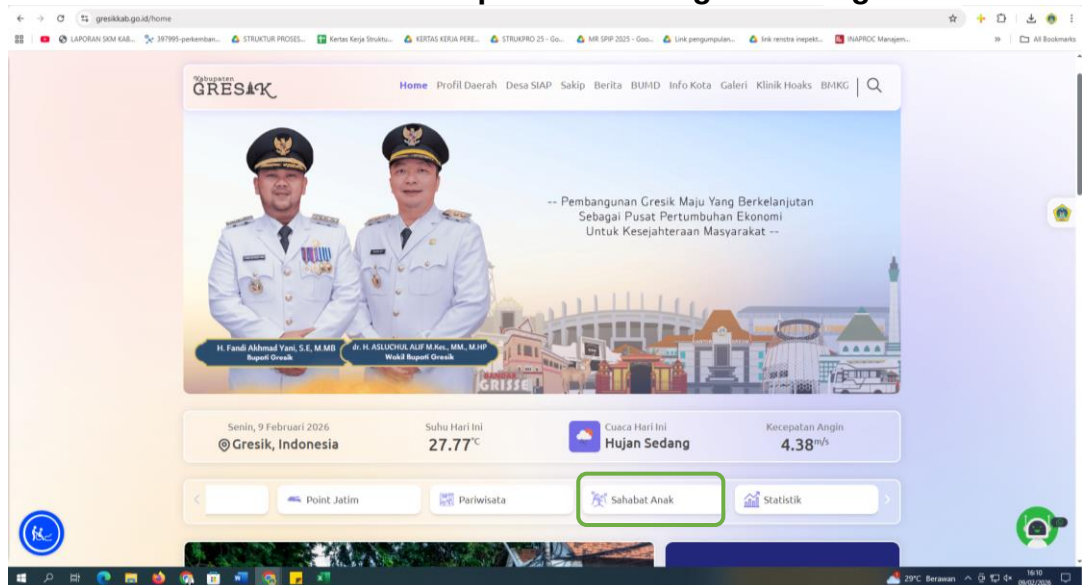
No	Bulan	Tahun 2025
1	Januari	27
2	Februari	40
3	Maret	18
4	April	15
5	Mei	10
6	Juni	36
7	Juli	26
8	Agustus	34
9	September	26
10	Oktober	36
11	Nopember	28
12	Desember	25
	Jumlah	321

8. Indikator yang kedelapan yaitu Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap

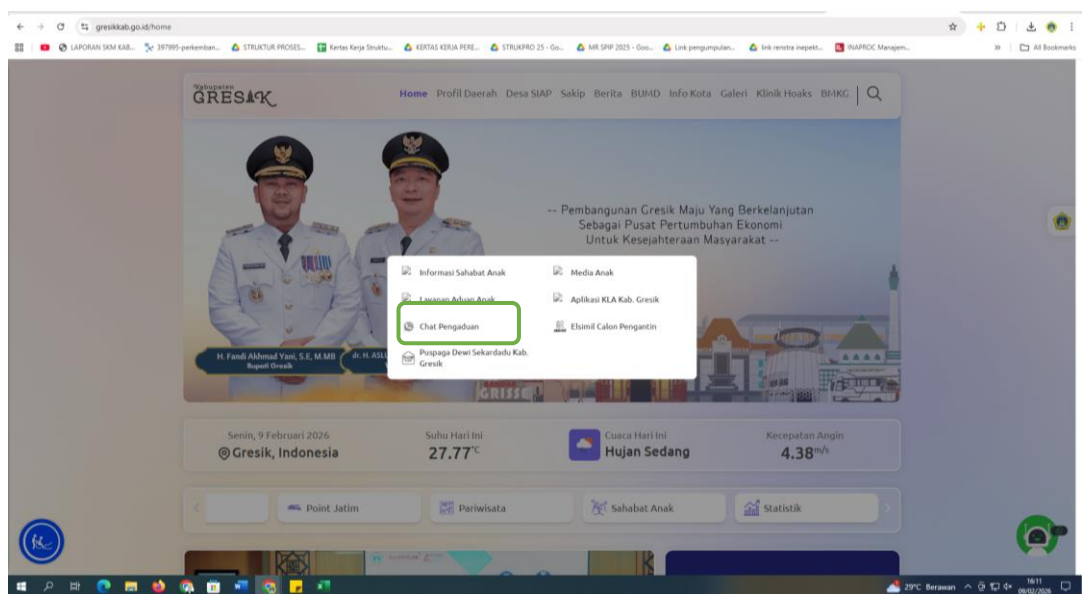
pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE pada tahun 2025 yaitu level 2 atau interaksi, yang berarti bahwa Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE. Penilaian level 2 didapatkan dari layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik yang telah terpublikasi dan terhubung pada website <https://www.gresikkab.go.id/>, sehingga masyarakat umum bisa mengakses layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik melalui website <https://www.gresikkab.go.id/> yang akan terhubung dengan akun whatsapp Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik.

Gambar 3.1
Menu Sahabat Anak pada Website gresikkab.go.id

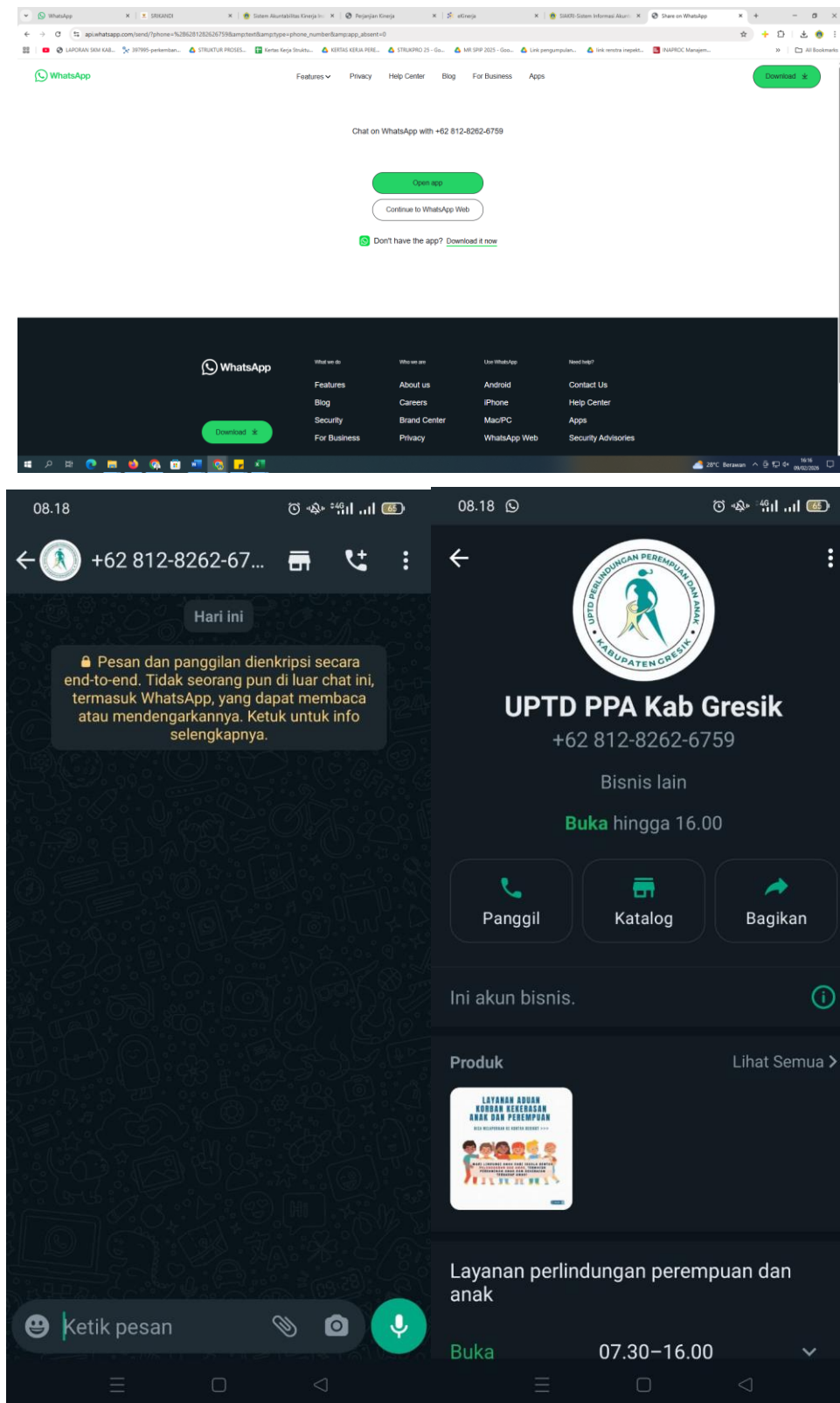


Gambar 3.2
Menu Chat Pengaduan



Gambar 3.3

Tampilan Chat Pengaduan UPTD PPA Kab. Gresik



Selanjutnya evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025-2029

1. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak;
3. Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan;
5. Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi;
6. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan;
7. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi;
8. Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan

Terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian sasaran strategis tahun 2025-2029, realisasi 12 (dua belas) indikator tersebut dapat dilihat pada table 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
untuk Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92 Kelahiran	1,92 Kelahiran	Nilai sama dengan tahun 2024
		Persentase Usia Kawin	9,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	Nilai 2025 sama dengan 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
		Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun			Nilai belum diumumkan
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	10 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	MENINGKAT
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	65,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	MENINGKAT
4	Meningkatkan	Rasio realisasi	40 Persentase	72,73 Persentase	MENINGKAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
	akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	(%)	(%)	
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	30,43 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	MENINGKAT
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,18 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	MENINGKAT
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	9 Persentase (%)	10.6 Persentase (%)	MENURUN
7	Meningkatkan akses, partisipasi,	Persentase kasus Kekerasan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
	kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif			
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	MENINGKAT

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 5 (lima) indikator dengan realisasi yang sama dengan tahun 2024, dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode renstra tahun 2025-2029. Penjelasan 12 (dua belas) indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Total Fertility Rate

Data Indikator Total Fertility Rate merupakan data yang diambil dari publikasi melalui aplikasi SIPERINDU Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), data yang dipublikasi merupakan realisasi data tahun 2025 dari hasil Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025, dimana data tersebut sama dengan data baseline tahun 2024 yaitu sebesar 1,92 kelahiran yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia subur.

2. Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun

Data Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun masih menggunakan realisasi data tahun 2024 dikarenakan data laporan usia nikah tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat. Realisasi indikator Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27% yang berarti bahwa terdapat 9,27% perempuan berusia dibawah sama dengan 20 tahun yang menikah dibandingkan dengan total semua perempuan yang menikah di tahun 2024.

3. Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator yang ketiga yaitu Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin, indikator ini merupakan indikator baru di renstra periode 2025-2029, Indikator ini mengukur tren atau tingkat pengajuan dispensasi kawin di pengadilan untuk calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator tersebut di tahun 2025 yaitu sebesar 11,92% dan meningkat ,92% dari baseline tahun 2024 yaitu 10%. Peningkatan tesebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kasus perkawinan usia anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

4. Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator ini menunjukkan seberapa besar cakupan layanan perlindungan yang diberikan kepada anak pekerja migran setelah mereka kembali ke daerah asal. Hingga akhir tahun 2025 belum ada anak pekerja migran yang dipulangkan, namun fasilitas pendampingan sudah tersedia pada UPT perlindungan perempuan dan anak (UPT-PPA). Sehingga realisasi indikator ini dianggap 100%.

5. Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif

Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan penanganan secara menyeluruh sesuai kebutuhan anak, dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.

Anak dalam situasi khusus mengacu pada anak yang menghadapi kondisi kerentanan atau ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraannya, antara lain meliputi:

- Anak korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual,
- Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
- Anak korban perdagangan orang,
- Anak korban bencana atau konflik,
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait.

Layanan komprehensif mencakup paling sedikit tiga dari lima kategori layanan utama, yaitu:

- Layanan medis/kesehatan,
- Layanan psikologis/psikososial,
- Pendampingan hukum dan bantuan hukum,
- Penyediaan shelter/rumah aman,
- Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026. Realisasi di tahun 2025 sebesar 100% sama dengan baseline tahun

2024 yang juga sebesar 100% yang berarti bahwa semua kasus anak korban kekerasan yang dilaporkan telah tertangani.

6. Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori: tangguh, berkembang, atau rentan. Pengukuran iBangga bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi keluarga, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keluarga.

Indikator ini diambil melalui Publikasi di aplikasi SIPERINDU Kemendukbangga, data yang digunakan merupakan data realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 76,9 skor indeks yang termasuk dalam kategori **iBangga** tinggi yang menunjukkan keluarga dalam kondisi tangguh, mampu memenuhi fungsi dan perannya secara optimal.

7. Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan

Rasio Realisasi Usulan Perempuan yang Diakomodasi dalam Perencanaan Pembangunan adalah persentase usulan kegiatan atau program yang disampaikan oleh perempuan melalui mekanisme partisipasi masyarakat (misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, forum konsultasi publik, atau kanal resmi pengusulan) yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan total usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode tertentu. Usulan perempuan yang dimaksud mencakup aspirasi, ide, atau kebutuhan yang diidentifikasi, dirumuskan, dan diajukan oleh perempuan secara individu atau kolektif, yang relevan dengan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan